

# Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan

Nurul Herawati<sup>1</sup>

Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo

## Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan identifikasi persoalan tentang buruh migran perempuan dan perlindungan pemenuhan hak ekonominya, mengidentifikasi faktor penarik dan pendorong apa yang menyebabkan banyak perempuan menjadi buruh migran dan kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi buruh migran perempuan tersebut. Penelitian ini dilakukan di desa Bragung, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan interview dan diskusi. Metode analisis menggunakan *Focus Group Discussion*.

**Kata kunci:** buruh migran perempuan, peraturan, perlindungan

## Abstract

*The purpose of this study was to identify the characteristics and identification of issues concerning the protection of women migrant workers and the fulfillment of economic rights, identify and attract the drivers of what causes many women become migrant workers, and policies regarding the protection and fulfillment of women's economic rights migrant workers. This research was conducted in Bragung village, Sub-Guluk Guluk Sumenep, this research uses a qualitative approach. Data collection using interviews and discussions. The method of analysis using a Focus Group Discussion.*

**Keywords:** women migrant worker, regulation, protection

Persoalan ketenagakerjaan, khususnya TKI atau buruh migran lebih banyak ditemui pada daerah-daerah dengan karakteristik, upah rendah, kondisi geografis yang tidak menguntungkan dan alasan ekonomi. Begitu juga pada wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Di salah satu kecamatan yakni Guluk-guluk terdapat desa yang mempunyai buruh migran yang jumlahnya besar, yakni desa Bragung.

Begitu juga pada buruh tani perempuan, mereka dengan upah Rp. 7000 dan buruh laki-laki dengan upah Rp. 15.000 ternyata tidak mampu menopang kehidupan mereka, apalagi dengan tingginya harga barang-barang pokok, biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan ditambah lagi dengan budaya tatengka (seperti kondangan, kematian, kelahiran, jenguk orang sakit dan lain-lain). Persoalan ini yang akhirnya menjadi alasan mereka memilih menjadi buruh di negeri asing tanpa memiliki informasi yang akurat mengenai proses bekerja di luar negeri, terutama bagi perempuan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal. Dengan demikian, eksploitasi

serta diskriminasi terhadap perempuan tidak dapat dihindarkan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan identifikasi persoalan tentang buruh migran perempuan dan perlindungan pemenuhan hak ekonominya, mereka adalah warga desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, Mengidentifikasi faktor penarik dan pendorong apa yang menyebabkan banyak perempuan menjadi buruh migran dan kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi buruh migran perempuan tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengungkapkan fakta secara deskriptif dan detail. Masyarakat desa dan pemerintahan desa yang akan menyampaikan sendiri fakta-fakta dan persepsinya sendiri tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, hasil dari fakta-fakta yang diungkapkan

<sup>1</sup> Korespondensi: N. Herawati, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo, Jl. Raya Telang PO Box 2 Kamal Bangkalan, Telp: 031-3013483, Email: Nurul3kuskamto@yahoo.com



sendiri oleh pemerintahan desa tersebut akan dijadikan bahan/sebagai rekomendasi untuk menyusun pola kebijakan dan pola kontrol yang selama ini ada.

Penelitian dilakukan di desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Informan ialah perempuan-perempuan yang dipilih secara purposive sampling dan dipilih dengan persoalan dan yang pernah melakukan migrasi dan pihak pemerintahan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui interview dan diskusi dan dianalisis secara kualitatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Deskripsi Persoalan Buruh Migran Perempuan**

Persoalan buruh migran perempuan yang terjadi di desa Bragung merupakan persoalan yang sering timbul dan menjadi persoalan negara. Beberapa masalah yang lolos dari kontrol desa yaitu penipuan warga calon TKI oleh calo, TKW pulang dalam keadaan hamil, TKW pulang dengan membawa anak tanpa suami dan lain-lain. Banyak persoalan yang berhubungan dengan migran perempuan ini, dianalisis dengan melihat gambaran faktor yang menyebabkannya.

Kebanyakan penduduk desa Bragung mempunyai mata pencaharian sebagai petani, sebesar 80% dari jumlah penduduk, pada umumnya bahwa hasil pertanian mereka, hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan sebagai buruh tani tidak dapat menopang hidup dengan baik, apalagi tingginya harga barang-barang pokok, biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan lain-lain. Alasan ekonomi menjadi alasan pertama untuk melakukan migrasi. Dan bekerja sebagai buruh migran.

Perempuan sebagai pelaku migrasi sangat potensial, mereka dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu harus membantu perekonomian keluarga. Dan bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang implisit “diharapkan”. Faktor upah masih menjadi alasan mengapa banyak perempuan di desa ini melakukan migrasi dan bekerja sebagai buruh migran, padahal mereka tidak berpendidikan memadai dan berkompotensi rendah. Perbedaan upah riil yang muncul karena perbedaan keterampilan dan pendidikan para pekerja. Keberadaan ketimpangan yang besar antara upah yang dibayarkan pada para pekerja dan yang setara dibayarkan pada pekerja terampil daerah pedesaan sebagai faktor penting dalam keputusan bermigrasi. Perbedaan pendapatan perkotaan-perdesaan muncul sebagai akibat stagnasi relatif pendapatan pertanian dan laju upah yang meningkat dengan cepat bagi pekerja yang tidak terampil.

Bagaimanapun, dalam batas-batas tertentu, kemajuan kawasan perkotaan sebagai daerah tujuan migran ini antara lain justru didukung oleh surplus tenaga kerja (informal) dari kawasan perdesaan sebagai daerah asal migran. Perpindahan dan memilih bekerja sebagai buruh migran merupakan konsekuensi dari perkembangan daerah. Perempuan desa ini melakukan migrasi karena kesempatan kerja di pedesaan semakin sempit, sehingga orang desa memandang perkotaan sebagai kawasan alternatif yang menjanjikan tingkat upah lebih tinggi.

Menurut teori pasar tenaga kerja, migran tertarik untuk melakukan migrasi dikarenakan oleh tingkat upah di daerah tujuan yang lebih besar daripada di daerahnya sendiri, namun hal itu tidak sama dengan kenyataan yang terjadi pada perempuan desa ini, mereka melakukan migrasi bukan karena upah yang lebih tinggi semata melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh kesempatan kerja yang ditawarkan di daerah tujuan lebih besar dibandingkan dengan daerah asalnya sendiri.

Perpindahan kerja perempuan desa ini memiliki pengaruh substitusi, artinya bahwa keberadaan perempuan desa Bragung di mata penduduk yang didatangi merupakan tenaga kerja pengganti, dengan skill relatif sama pada pekerjaan yang sama. Keberangkatan perempuan desa tersebut sebagai TKW memunculkan persoalan baru, tidak hanya persoalan upah tetapi perlindungan terhadap mereka, atas keberadaan dan jaminan atas pekerjaannya tersebut. Perempuan desa ini mengatakan bahwa yang mereka cari Cuma kerja, tidak terpikirkan bagaimana kondisi mereka nantinya di tempat tujuan. Dibenak mereka, hanya ada uang dan mereka dapat mengirimkan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas perekonomian keluarga.

**Faktor Penarik/Pendorong Para Perempuan Memilih sebagai Buruh Migran.**

Sebanyak besar perempuan desa Bragung memilih sebagai buruh migran adalah untuk mempertahankan hidup keluarganya, dalam arti sebagai upaya perbaikan perekonomian. Rendahnya pendapatan pada perekonomian keluarga dan beban ketergantungan tersebut menyebabkan mereka memutuskan untuk bekerja sebagai buruh migran.

Mata pencaharian sebagai petani kurang mampu memberikan jaminan hidup secara layak. Apalagi sebagian besar dari mereka memiliki penguasaan lahan yang sempit. Pendapatan dari hasil bertani hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Keadaan seperti ini semakin buruk dengan kondisi potensi sumber daya alam yang sangat rendah, di

mana lahan-lahan pertanian hanya mampu memproduksi maksimal saat musim hujan saja, sedangkan di musim kemarau mereka semakin tidak berdaya karena lahan-lahan telah kering sehingga dibutuhkan biaya yang mahal agar ladang yang mereka miliki tetap bisa ditanami. Bahkan ketika musim kering datang, banyak lahan-lahan yang dibiarkan begitu saja tanpa ditanami tanaman apapun. Meskipun ada yang tetap ditanami tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan banyak air seperti kacang tanah, ubi dan jagung, namun hal itu tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan layaknya tanaman padi. Menanam padi saat musim hujan sangat membantu migran untuk memenuhi kebutuhannya karena hasil panen sebagian besar tidak untuk dijual melainkan untuk dimakan sendiri dan kalau masih ada persediaan lebih, maka persediaan tersebut dipakai disaat tiba musim kemarau.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadi faktor penghambat untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian khususnya sektor industri. Sehingga mereka hanya mampu terserap oleh sektor informal saja. Hal itu pula yang menyebabkan perempuan desa memilih sebagai buruh migran dengan segala upaya, asalkan mereka bisa berangkat.

Jumlah pendapatan yang besar seakan membius mereka untuk segera menyusul teman, suami atau orang-orang lain yang sama profesinya dan pulang ke daerahnya dengan berbagai fasilitas baru. Sedangkan menurut Informan, kekayaan seseorang di desanya dapat diukur dari bentuk rumah, perabot, fasilitas yang dipunyai, hal tersebut yang memacu orang lain yang melihatnya ingin meniru. Dan pendapatan perempuan desa yang tidak sebagai buruh migran, mempunyai pendapatan yang hanya bisa diukur dari hasil panen yang didapatnya karena sebagian besar hasil panen tidak dijual tapi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Alasan perbedaan pendapatan antara perempuan buruh migran dan tidak, menjadi pilihan seseorang untuk memilih sebagai buruh migran. Tujuan mereka memilih menjadi buruh migran, salah satunya ialah hanya ingin merubah status pendapatannya. Sulitnya mencari pekerjaan di tempat asal juga menjadi salah satu faktor pendorong buruh migran.

Seorang Informan menyatakan bahwa mencari pekerjaan di daerahnya sangat sulit. Selain karena terbatasnya lapangan pekerjaan juga keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Kondisi geografis desa yang jauh desa maupun kota

juga turut andil dalam menghambat mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan cara yang lebih mudah.

Selain alasan yang berperan sebagai faktor pendorong migrasi di atas, ada beberapa faktor eksternal keluarga yang sangat kuat menarik para tenaga kerja pedesaan untuk bermigrasi yaitu kontak dengan media, kehadiran migran di desa. Informasi melalui radio dan televisi yang bias perkotaan melahirkan simbol teknologi dan keramaian sebagai ciri kemajuan. Sementara kehadiran migran yang pulang secara periodik, membawa cerita, gaya dan penampilan yang disimbolkan sebagai identitas sebagai warga kota yang maju dan modern. Simbol-simbol itu dinilai sebagai indikator kemajuan status ekonomi maupun sosial di masyarakat. Sebagai sesama warga desa yang terkait hubungan keluarga atau ikatan sosial yang berjarak dekat, para migran terdahulu merupakan titik pembentuk jaringan sosial yang memberi kekuatan psikologis bagi calon migran untuk melakukan migrasi. Oleh karena itu, umumnya migrasi didasarkan pada peluang *faktual* pekerjaan di perkotaan, bukan pada peluang *potensial* semata.

### **Deskripsi Kebijakan Pemerintahan Desa atas Perlindungan Buruh Migran Perempuan**

Sampai saat ini belum kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap buruh migran yang berangkat ke luar negeri (pernyataan Informan), kebijakan pemerintahan Desa hanya berdasarkan kebijakan pemerintahan pusat. Apalagi kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap keluarga buruh migran perempuan yang ia tinggalkan. Perempuan sebagai ibu yang meninggalkan keluarganya, mencari nafkah dan meninggalkan anak-anak mereka yang menjadi wajib mereka asuh, dalam kenyataannya anak-anak mereka titipkan pada orang tua, saudara atau suami ataupun orang lain.

Perlindungan keluarga buruh migran perempuan belum diberikan oleh pemerintahan desa, baik perlindungan dengan memberikan jaminan kesehatan, pendidikan anak-anak yang ditinggalkan. Perlindungan terhadap buruh migran perempuan juga belum diberikan oleh pemerintahan desa, baik jaminan perlindungan dari ketidakadilan dan mendapat jaminan kesejahteraan bagi keluarganya.

Keseriusan pemerintahan desa dalam hal mengeluarkan sebuah kebijakan yang berhubungan dengan keberadaan buruh migran perempuan belum ada. Padahal banyak sekali persoalan yang berhubungan

dengan mereka, keterpaksaan perempuan memilih sebagai buruh migran menjadi alasan banyak hal untuk melakukan apa saja, asal mereka dapat pergi bekerja. Beberapa kasus pemalsuan KTP, Umur, alamat, dan masalah hal perijinan, dan lain-lain. Masih menjadi persoalan yang rumit.

Keikutsertaan pemerintah desa dalam hal pemberian perlindungan terhadap buruh migran perempuan menjadi ujung keseriusan pemerintah dalam hal mengurangi persoalan-persoalan buruh migran. Bahkan, ada kesan bahwa aparat desa sendiri terlibat konspirasi penjaringan calo buruh migran dengan memudahkan pemalsuan KTP.

Berkaitan dengan keberadaan buruh migran perempuan di desa, banyak persoalan yang berhubungan dengan administrasi desa, disadari atau tidak, bahwa persoalan buruh migran perempuan tidak hanya berimbas pada dirinya sendiri, melainkan keluarga, masyarakat dan tentu saja pemerintahan desanya. Masalah yang akan, sedang atau belum dialami buruh migran perempuan dianggap sebagai persoalan hidup yang harus dihadapi, karena tuntutan dan desakan ekonomi serta kebutuhan hidup terus menjadi motivasi berangkat kerja di luar negeri.

Pemalsuan KTP, gaji yang tidak dibayarkan, penyiksaan dan penganiayaan, pelecehan seksual, tidak boleh melakukan ibadah, dan lain-lain adalah bagian dari hidup para migran perempuan. Sementara pengawasan terhadap persoalan tersebut belum dijamin oleh pemerintahan desa, notobene mereka adalah pelindung terdekat, yang mewakili pemerintahan pusat. Pengawasan dan perlindungan pemerintahan desa saat ini sangat lemah terhadap perlindungan dan pengawasan buruh migran perempuan, terbukti pemerintahan desa tidak memiliki data tertulis jumlah penduduknya yang bekerja di luar negeri secara detail dan lengkap. Selain itu, dipastikan juga bahwa masih banyak calo pencari tenaga kerja wanita masih dengan leluasa kelaur masuk desa untuk mencari mangsa.

Kebijakan pemerintahan desa mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi buruh migran perempuan belum tersedia, padahal tata pemerintahan yang baik dapat dihadirkan dalam realitas sosial dengan mengedepankan prinsip dasar keterwakilan, aspiratif dan penegakan hukum serta memberikan perlindungan terhadaparganya.

Pendekatan tata pemerintahan desa yang baik perlu didorong untuk menjangkau ke dalam hubungan pada tiap unit sosial terkecil di masyarakat, termasuk keluarga buruh migran, karena hubungan kekuasaan

dalam masyarakat sangat penting dalam membentuk satu budaya tertentu. Begitu juga pada persoalan buruh migran perempuan yang semakin membudaya dan dianggap biasa ketika terdapat persoalan-persoalan yang muncul akibat buruh migran tersebut. Berbagai pendekatan harusnya dibuat sebagai pola yang menjembatani sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadaparganya.

Revitalisasi kebijakan diarahkan untuk meletakkan unsur-unsur representatif perempuan dan memberikan jaminan terhadap keberadaan buruh migran perempuan. Kebijakan mengedepankan partisipasi perempuan sebagai subjek/pelaku migrasi. Mereka diberikan ruang partisipasi dan peran untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pemerintahan desa. Kebijakan tersebut merupakan jaminan terhadap perempuan dan merupakan bentuk perlindungan dari praktik-praktik penipuan. Penipuan dari pemalsuan KTP, kelengkapan dokumen yang sering dipalsukan (yayasan pengembangan pedesaan, 1992, Tirtosudarmo, dan Romdiati, 1997, Raharto, 2000).

Adanya calo yang melakukan aktivitas di luar jalur resmi, proses pemberangkatan migran secara ilegal, dan berbagai persoalan perempuan desa yang ditawarkan dengan banyak kemudahan-kemudahan, seperti pemberangkatan, dokumen, pinjaman uang, dan kondisi ini banyak digunakan oleh perempuan buruh migran yang memilih jalur ilegal. Dan banyak dari mereka yang menggunakan jasa calo tersebut (Hugo, 1993, Spaan, 1994, Raharto, dkk, 1999). Dibalik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh calo, calo melakukan berbagai praktik penipuan dan pemerasan terhadap calon buruh migran (Okunishi, 1996). Kasus-kasus eksploitasi, baik ekonomi maupun fisik sering dilakukan oleh calo (Tyner, 1994, Adi, 1996). Pemberangkatan buruh migran karena pertolongan calo cukup besar, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi belum berjalan baik.

Perempuan yang menjadi buruh migran, terbanyak mereka mempunyai pendidikan rendah. Temuan ini sesuai dengan (Goma, 1993, Hugo, 1995, Adi, 1996, raharto, 1999), yakni ciri dari tenaga kerja migran adalah mereka berpendidikan rendah.

Dalam kasus-kasus yang lebih luas, perempuan desa ini akan menemukan tingkat kompetisi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan kecenderungan baru migrasi pekerja terampil ke berbagai daerah yang mendesak pekerja tidak terampil ke lapisan menengah

ke bawah dalam struktur produksi dan pasar tenaga kerja terutama ke negara-negara berkembang yang tidak mampu bersaing pada tingkat pasar yang lebih kompetitif. Pada skala regional, penumpukan tenaga kerja tersebut dapat menjadi ancaman bagi terjadinya instabilitas baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Secara teoretis pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, negara, kawasan maupun daerah tertentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan pola konsumsi masyarakat misalnya merupakan salah satu aspek terlihat paling menonjol. Aktivitas migrasi yang berlangsung dari suatu wilayah ke wilayah tertentu merupakan imbas positif yang berkembang sebagai suatu konsekuensi pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Makin baik perkembangan ekonomi suatu wilayah maka kemungkinan terjadinya perkembangan volume migrasi pun akan semakin tinggi.

Perubahan pendapatan masyarakat desa akibat buruh migran secara langsung memiliki implikasi dalam proses pengembangan pembangunan desa, yaitu: 1) Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kesempatan kerja antar daerah, 2) Meningkatnya apresiasi masyarakat antar daerah dalam hubungan-hubungan sosial, budaya, dan ekonomi, 3) Berkembangnya suatu hubungan baru, 4) Munculnya kesepakatan-kesepakatan migrasi antardaerah dan, 5) Terjadinya peningkatan pendapatan sebagai implikasi langsung dari remittan dan besarnya volume migrasi kembali.

Kelima aspek ini dalam proses pembangunan desa, menjadi dasar masukan alternatif dalam perumusan arah kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan posisi buruh migran. Hal ini mengingat bahwa suatu proses improvisasi kualitas seluruh sumber daya yang ada ditujukan untuk meningkatkan standar kehidupan manusia, dengan mempertimbangkan terciptanya kondisi yang kondusif demi menciptakan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih stabil (Todaro; 1989). Mobilitas penduduk antardaerah maupun antarnegara, menunjukkan frekuensi yang semakin meningkat (Hugo: 1993, Mantra: 1995) hal ini karena mobilitas penduduk dipandang sebagai bentuk aktivitas yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Oleh karena itu banyak penduduk usia produktif perempuan cenderung memilih keluar dari daerah asalnya ke daerah lain yang dianggap lebih baik secara ekonomi.

Secara umum ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya peningkatan mobilitas

penduduk. Pertama: kondisi ekonomi daerah yang masih tergolong miskin tidak meningkat. Kedua: adanya perbedaan upah dan pendapatan yang relatif lebih tinggi di daerah tujuan. Dan melihat besarnya perenpuan yang melakukan menjadi buruh migran, pemerintahan desa harusnya memberikan perhatian lebih pada persoalan-persoalan yang muncul. Kesadaran masyarakat desa pada perlindungan dan jaminan ekonomi menjadikan pemerintahan desa untuk mulai menyusun kebijakan-kebijakan yang mengutamakan perempuan dan buruh migran.

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, Kondisi geografis wilayah dan mata pencaharian suami yakni petani menjadi alasan mengapa banyak perempuan memilih menjadi buruh migran. *Kedua*, Faktor pendorong dan penarik perempuan untuk memilih menjadi buruh migran adalah faktor pendidikan dan keterampilan yang rendah, upah daerah asal rendah, pendapatan rendah, faktor eksternal keluarga yang sangat kuat menarik para tenaga kerja pedesaan untuk bermigrasi yaitu kontak dengan media, kehadiran migran di desa. Informasi melalui radio dan televisi yang bias perkotaan melahirkan simbol teknologi dan keramaian sebagai ciri kemajuan.

Ketiga, kebijakan pemerintah desa mengenai perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi buruh migran belum ada, sehingga masih dijumpai mengenai persoalan-persoalan tersebut yaitu di antaranya pemalsuan KTP, buruh pulang dalam keadaan hamil, keluarga yang ditinggal terlantarkan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diajukan beberapa saran, sebagai berikut: 1) Kebijakan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi buruh migran perempuan menjadi alternatif penjamin kesejahteraan buruh migran dan keluarga yang ditinggalkan, dimulai dari kebijakan pemerintahan desa yaitu dengan mengontrol keberangkatan sampai proses perekrutan perempuan-perempuan yang menjadi buruh migran. Saatnya pemerintah desa dan beberapa instansi yang terkait menyusun kebijakan yang sesuai, 2) Keterbatasan dalam penelitian terletak pada pendekatan analisis yang dipakai, yaitu hanya pada pendekatan kebijakan, belum pada tataran budaya masyarakat setempat,

dan ini membuka peluang penelitian baru mengenai persoalan buruh migran perempuan yang dikaitkan dengan budaya masyarakat setempat.

### Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. (1996) *The Impact of International Labour Migration in Indonesia. PhD Thesis Submitted in Population and Human Resources, Department of Geography, Faculty of Art, The University of Adelaide.*
- Eni, Sri. (2006) *Analisis Pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jawa Timur.* Media Tren. Vol. 1. No. 2. 62–63.
- Goma, Naomi, Ida Bagoes mantra dan R. Bintarto. (1993) *Mobilitas Tenaga Kerja Folres Timur ke Sabah Malaysia dan pengaruhnya terhadap daerah Asal: Studi Kasus Desa Neleren, Kecamatan Adonara Timur,* dalam BPPS UGM. Vol 6 (4A), Nopember.
- Harding, S. (1987) *Feminism and Methodology; Social Science Issues,* Milton Keynes: Open University.
- Hanafie, SRM Jajuk. (2004) *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Migrasi dan Perilaku Pekerja Migran Internasional.* Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Hugo, Graeme. (1987) *The Demographic Dimension in Indonesia Development,* Singapore OUP.
- \_\_\_\_\_. (1993) *Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trend and Policy Implications,* Southeast Asian Journal of Social Science. Vol. 21 (2): 36–70.
- \_\_\_\_\_. (1995) *Asia on the Move: Research Challenges For Population Geography, Revised Version of Wiley Guest Lecture, International Conference on Population Geography,* University of Dundee, 16 September 1995.
- Illich, I. (1983) *Gender,* London, Marison Boyars.
- Raharto, Aswantini, et al. (1999) *Migrasi dan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia: Isu Ketenagakerjaan,* dalam Aswantini Rhanato(ed), Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan: PPT-LIPI.
- Stanley, L. (1990) *Feminist Praxis: Research, Theory and Epistimology in Feminist Sociology,* London: Routledge.
- Spaan, E. (1994) *Taikong and calos: The Role of Middlemen and Brokers in Javaness International Migration.* *International Migration Review,* Vol. 28 (1). 93-113.
- Tirtosudarmo, dkk. (1997) *A Need Assesment Concerning Indonesian Women Migrant Workers to Saudi Arabia.* Laporan Penelitian PPT-LIPI dan ILO.
- Tyner, James A. (1994) *The Social Construction of Gendered Migration from The Philipines.* *Asia and Pasific,* International Journal, Vol. 3 (4). 589–616.
- Yayasan Pengembangan Pedesaan. (1992) *A Report on Domestic Helper Trade in Indonesia: With A Micro Study From East Java.* Laporan Penelitian.